

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPAN AN
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1	2	3	4	5	6			7
1	Informasi tentang Profil Badan Publik							
a.	Kedudukan dan alamat lengkap Kantor Badan Publik	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	Selama berlaku
b.	Visi dan Misi	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	Selama berlaku
c.	Tugas Pokok dan Fungsi	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	Selama berlaku
d.	Struktur Organisasi Serta Profil Singkat Pejabat Struktural. Memuat Rincian Struktur Organisasi Dinas PUPRPRPKP Provisni Kepulauan Bangka Belitung	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	Selama berlaku
2.	LHKPN pejabat yang diverifikasi	Sekretariat	Sekretaris	2022			√	Selama berlaku

	LHKPN Pejabat Struktural pada Dinas PUPRPRPKP Provisni Kepulauan Bangka Belitung							
3.	Ringkasan Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan Ringkasan Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah	Sekretariat	Sekretaris					1 Tahun
a.	Nama Program Prioritas	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	1 Tahun
b.	Target Capaian Program dan Kegiatan	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	1 Tahun
4.	Informasi Laporan Akuntabilitas							
a.	Ringkasan Informai Kinerja Dinas PUPRPRPKP Provisni Kepulauan Bangka Belitung -LAKIP	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	1 tahun
b.	Laporan layanan Informais Publik Ringkasan Laporan Permohonan Informasi Publik Tahun 2022	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	1 tahun
5.	Pengumuman Pengadaa Barang dan Jasa Ringkasan Paket –paket kegiatan APBD yang akan dilelalkan tahun 2023	Sekretariat	Sekretaris	2023			√	1 tahun
6.	Ringkasan Laporan Keuangan	Sekretariat	Sekretaris	2023				

a.	Laporan Realisasi Anggaran 2022 Realisasi Anggaran yang berakhir di Tahun 2022 dengan rincian dana anggaran dan realisasi anggaran	Sekretariat	Sekretaris	2023			√	1 tahun
b.	Daftar Aset dan Inventaris Rekap Aset Inventarisasi Tahun 2022 dengan rincian: - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Jalan, irigasi dan jaringan - Aset tetap lainnya	Sekretariat	Sekretaris	2023			√	1 tahun

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT								
NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1	2	3	4	5	6			7
1.	Daftar Informasi Publik (DIP) Berisi informasi Daftar Informasi tahun 2023 yang diumumkan secara berkala, setiap saat dan serta merta	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	Selama berlaku

2.	Kebijakan Badan Publik Informasi Tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan Publik	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	Selama berlaku
3.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik sesuai ketentuan KIP Berisi tentang: 1. Mekanisme permohonan informasi publik 2. Form permohonan informasi publik 3. Progress permohonan 4. Mekanisme keberatan informasi publik	Sekretariat	Sekretaris	2023	√		√	Selama berlaku
4.	SOP Layanan PPID Pembantu Standart Operasional Prosedur tentang pelayanan Informasi Publik	Sekretariat	Sekretaris	2022	√		√	Selama berlaku
5.	Informasi tentang Rencana Pembanguna Daerah							
a.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Perubahan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2005-2025	Sekretariat	Sekretaris		√		√	20 tahun
b.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretariat	Sekretaris	2022	√		√	3 tahun
c.	Rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretariat	Sekretaris	2022	√		√	1 Tahun

6.	Informasi tentang Rencana Strategi Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
a.	Rencana Strategis Perubahan Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022	Sekretariat	Sekretaris	2017	√		√	5 tahun
b.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretariat	Sekretaris	2022	√		√	1 tahun

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI (PERIHAL)	UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosedur Peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat Perubahan Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretariat	Sekretaris	2022	√		√	Selama Berlaku

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
					AKIBAT JIKA INFO TERBUKA	MANFAAT JIKA INFO TERTUTUP	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> UU No.18/2003 ttg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana 	Mengamankan dan melindungi alat bukti.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.

	proses penegakan hukum	Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.19/2003 ttg Advokat. • Hukum Acara Perdata. • Hukum Acara Pidana. 	Mengamankan dan melindungi dokumen perkara	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
		Opini hukum (legal opinion)	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Jaksa Agung No.Kep225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara • UU No.18/2003 ttg Advokat 	Mengamankan, melindungi dokumen hukum.	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Tidak terbatas
		Surat/memo/ catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Mengamankan, melindungi dokumen hukum	Mengganggu proses hukum.	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan UndangUndang
		Proses hukum PNS bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
		Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.18/2003 ttg Advokat • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h • Hukum Acara Perdata/Pidana 	Belum berkekuatan hukum tetap.	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamankan dan melindungi alat bukti • Tidak mengganggu/menghambat proses hukum 	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan UndangUndang
2.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Rincian Harga Satuan dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam pelelangan	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa
		Dokumen Pendukung Pengadaan Barang Dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Menjamin kerahasiaan dokumen	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa

			<ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Pasal 17 B, 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011 				
		Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas
		Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 • Undang-undnag nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang • Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penyerahan ke dua (FHO)
3.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

		Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h • PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural • PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 • PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil • PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
		Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Mengungkap data pribadi PNS	Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
4.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi	Biodata elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Terhindar dari penyalahgunaan/penge-ditan/rekayasa oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

	Informasi atau Pengadilan						
		Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP 	Melindungi/ menjamin kerahasiaan data pribadi PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai mendapat ijin dari pejabat yang berwenang
		Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I, 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Terbatas sampai dengan Mutasi /Pengangkatan
		Dokumen/ Berkas/Arsip PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
		Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

		Data rekam medis PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h • Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Dapat merugikan PNS • Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Untuk melindungi Keamanandan 	Tidak Terbatas
		Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i • PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000. 	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Menggangu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.	Terbatas sampai dengan pelantikan
5.	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangundangan	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundangan dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas

6.	Rahasia jabatan	Rahasia jabatan	UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
7.	Belum dikuasai atau didokumentasi	Data Perencanaan (Gambar, RAB, RKS) sebelum lelang dan pengadaan berlangsung)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Terbatas sampai dengan audit dari BPK
		Dokumen Kontrak beserta Data Pendukung	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Terbatas sampai dengan audit dari BPK
		Dokumen RKA	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Terbatas sampai dengan audit dari BPK
		Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 tahun 2002 tentang keuanagn Negara, pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
		Dokumen pertanggungjawaban keuangan negara	- UU No. 17 tahun 2002 tentang keuanagn Negara, pasal 31 ayat (1) - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya dokumen pertanggungjawaban keuangan negara yang telah diaudit

